BPKPAD
KAB TEMANGGUNG

RENJA PERUBAHAN

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2026



HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 28 Agustus 2026

Koordinator	PETUGAS VERIFIKATOR
EWIEK KHAVIDA, S.STP,M.M.	AZIZ SUGIHARTO, S.AP..
NIP. 198311182002122001	NIP. 197810041997031001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, petunjuk, kemudahan, serta kesehatan yang telah diberikan, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap dokumen Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2026 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perubahan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026, guna mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini juga merupakan respons terhadap perkembangan kondisi, tantangan, dan permasalahan aktual yang dihadapi selama pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung pada masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 28 Agustus 2026

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,



N. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007191990091001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, petunjuk, kemudahan, serta kesehatan yang telah diberikan, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap dokumen Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Tahun 2026 yang telah disusun sebelumnya. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perubahan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026, guna mendukung percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja ini juga merupakan respons terhadap perkembangan kondisi, tantangan, dan permasalahan aktual yang dihadapi selama pelaksanaan rencana kerja tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung pada masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 28 Agustus 2026

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

0N. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007191990091001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI..... ii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL.....v

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan 1

1.2. Landasan Hukum.....2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan.....5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKPAD.....6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKPAD 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....20

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.....20

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja BPKPAD 2026 28

BAB IV PENUTUP.....39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 6
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Program BPKPAD..... 8
Tabel 2. 3 Capaian Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 BPKPAD 12
Tabel 3. 1 Rencana Perubahan Renja Tahun 2026.....21
Tabel 3. 2 Perubahan Program dan Kegiatan BPKPAD Tahun 2026 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, maka Perangkat Daerah harus segera menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika yang terjadi.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah:

a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2026 dengan pagu APBD tahun 2026.

b. Munculnya sub kegiatan baru yaitu sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
d. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Tahun 2026 melalui tahapan-tahapan :

1) Persiapan penyusunan;
2) Penyusunan rancangan awal;
3) Penyusunan rancangan;
4) Perumusan rancangan akhir.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daeah Tahun 2026;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2026, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan, dan Aset Daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sampai dengan triwulan II sesuai dengan kriteria pencapaiannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Capaian indikator kinerja disajikan sebagai sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berikut adalah capaian kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah, sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja IKUPD dan Kinerja Program dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;

2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan dengan skala nilai peringkat kinerja yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa :
    a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
    b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah; dan
    c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 merupakan tahun kedua penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

A. Evaluasi Kinerja IKUPD dan Program

Capaian kinerja IKUPD dan Program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 2

Capaian Kinerja Program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

No	Program	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2026	Realisasi 2026 2026 s.d TW II	Capaian s.d TW II 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja
INDIKATOR SASARAN							
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN							
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	1	Nilai IKM Perangkat Daerah	86.87	86.87	100	**ST**
		2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.1	77.00	99.87	**ST**
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang efektif, efisien, dan tertib	**3**	Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	73.9	66.8	90.39	**ST**
		4	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100	**ST**
Capaian					**97.57**		
INDIKATOR PROGRAM							
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
1	Meningkatnya Kualitas Penganggaran	1	Cakupan pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* dalam APBD	75	71.43	95.24	**ST**
		2	Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100	100	100	**ST**
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perbendaharaan Daerah	3	Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100	100	100	**ST**
		4	Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas Daerah	100	100	100	**ST**
3	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban & pelaporan keuangan daerah	5	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100	100	100	**ST**

No	Program	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2026	Realisasi 2026 2026 s.d TW II	Capaian s.d TW II 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						
4	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	6	Persentase Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100	100	100	**ST**
		7	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja	98.25	100	100	**ST**
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
5	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	8	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	4.57	1.12	24.50	**SR**
		9	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	98.29	40.37	41.07	**R**
Capaian						**84.53**	

Sumber : IKPD BPKPAD Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.2, hasil evaluasi terhadap kinerja indikator sasaran dan indikator program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kinerja telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran sebesar 97,57 dan capaian indikator program sebesar 84,53. Sebagian besar indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi (ST), meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut, khususnya pada aspek pengelolaan pendapatan daerah.

1. Indikator Sasaran

   Pada indikator ini, Nilai IKM Perangkat Daerah mencapai 100 persen dari target dengan nilai 86,87 dan memperoleh peringkat Sangat Tinggi. Nilai AKIP Perangkat Daerah mencapai 99,87 persen dari target dengan nilai 77,00, juga berada pada kategori Sangat Tinggi. Selanjutnya, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terealisasi sebesar 66,80 dari target 73,90 atau mencapai 90,39 persen dan masih berada pada kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, Opini BPK atas LKPD telah mencapai target WTP dengan capaian 100 persen dan memperoleh peringkat Sangat Tinggi.

2. Indikator Program

   Pada tingkat indikator program, Program Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD mencapai 95,24 persen dari target dan berada pada kategori Sangat Tinggi. Demikian pula indikator ketepatan waktu dokumen penganggaran, penerbitan SP2D online, rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah, serta penyampaian LKPD tepat waktu seluruhnya mencapai 100 persen dan berada pada kategori Sangat Tinggi.

   Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, kedua indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Penyampaian laporan daftar Barang Milik Daerah tepat waktu mencapai 100 persen, sedangkan pemanfaatan aset di satuan kerja mencapai 100 persen, keduanya berada pada kategori Sangat Tinggi.

   Sementara itu, pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat capaian yang perlu menjadi perhatian. Indikator persentase peningkatan target pajak daerah mencapai 24,50 persen dari target kinerja dan termasuk kategori

Sangat Rendah (SR). Selain itu, indikator persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target pajak daerah baru mencapai 41,07 persen sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan berada pada kategori Rendah (R). capaian ini sampai dengan Triwulan II belum dapat dijadikan gambaran final atas kinerja penerimaan pajak daerah Tahun 2026. Perkembangan penerimaan pada semester II masih sangat menentukan capaian akhir tahun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pemungutan dan penagihan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi potensi objek pajak, serta monitoring dan evaluasi penerimaan secara berkala untuk mendorong percepatan realisasi pada Triwulan III dan Triwulan IV. capaian indikator program sebesar 84,53 menunjukkan bahwa kinerja program BPKPAD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berada pada tingkat yang cukup baik, dengan sebagian besar indikator telah mencapai kategori Sangat Tinggi.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan/Subkegiatan

Capaian kinerja Kegiatan/Subkegian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 3
Capaian Kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 BPKPAD

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II 2026	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW 2 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	URUSAN KEUANGAN							
	BIDANG URUSAN KEUANGAN							
A.	Program pengelolaan keuangan daerah	408,823,974,500	374,277,879,011	51,328,393,991				
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	139,810,500	218,000,000	11,281,500				
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24,000,000	18,000,000	4,875,500	2	0	0	Sangat Rendah
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17,500,000	15,000,000	0	2	0	0	Sangat Rendah
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	98,310,500	90,000,000	6,406,000	2	0	0	Sangat Rendah
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	122,000,000	95,000,000	0	2	0	0	Sangat Rendah
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	225,000,000	158,999,564	29,473,500				
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	225,000,000	158,999,564	29,473,500	12	12	100	Sangat Tnggi
3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	408,135,664,000	373,680,879,447	51,263,882,491				

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II 2026	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW 2 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	393,423,070,000	357,405,623,957	51,263,882,491	12	6	50	Rendah
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13,712,594,000	15,076,916,490	0	12	6	50	Rendah
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1,000,000,000	1,198,339,000	0	1	1	100	Sangat Tnggi
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	323,500,000	220,000,000	23,756,500				
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	196,500,000	170,000,000	20,564,000	2	2	100	Sangat Tnggi
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	127,000,000	50,000,000	3,192,500	1,236	618	50	Rendah
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	423,000,000	274,250,000	42,772,850				
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	423,000,000	274,250,000	42,772,850				
	Penyusunan Standar Harga	10,500,000	10,500,000	765,600	2	1	50	Rendah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	365,000,000	240,000,000	37,874,650	1,236	618	50	Rendah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	47,500,000	23,750,000	4,132,600	412	412	100	Sangat Tnggi
C	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	522,219,244	373,109,622	60,369,000				
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	522,219,244	373,109,622	60,369,000				

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II 2026	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW 2 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
	Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	192,219,244	96,109,622	12,481,000	2	1	50	Rendah
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90,400,000	75,000,000	24,455,750	2	1	50	Rendah
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	196,600,000	175,000,000	16,271,000	2	1	50	Rendah
	Penagihan Pajak Daerah	18,000,000	12,000,000	4,403,000	4	2	50	Rendah
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	25,000,000	15,000,000	2,758,250	4	2	50	Rendah
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23,618,571,604	25,300,719,364	8,664,630,671				
1	Administrasi Keuangan	22,380,891,785	24,305,812,045	8,288,582,322				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,380,891,785	24,305,812,045	8,288,582,322	64	64	100	Sangat Tnggi
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126,000,000	104,800,000	22,369,801				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	7,500,000	-	12	6	50	Rendah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	20,000,000	1,411,500	12	6	50	Rendah
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,000,000	8,550,000	2,705,000	12	6	50	Rendah
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,000,000	23,750,000	5,084,000	12	6	50	Rendah
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,000,000	45,000,000	13,169,301	12	6	50	Rendah

No	Bidang /Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d TW II 2026	Kinerja			Skala Nilai Peringkat Kinerja
		Renja	APBD		Target 2026	Realisasi TW 2 2026	Capaian s.d 2026 (%)	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726,863,619	709,756,929	309,190,916				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215,000,000	200,000,000	80,462,448	12	6	50	Rendah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	511,863,619	509,756,929	228,728,468	12	6	50	Rendah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384,816,200	180,350,390	44,487,632				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90,316,200	85,800,390	34,653,132	51	51	100	Sangat Tnggi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	242,000,000	50,000,000	3,074,500	2	2	100	Sangat Tnggi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	9,550,000	900,000	45	45	100	Sangat Tnggi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42,500,000	35,000,000	5,860,000	919	919	100	Sangat Tnggi
	Jumlah	433,387,765,348	400,225,957,997	60,096,166,512	15.02			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan sub kegiatan, diketahui bahwa:

- **Realisasi kegiatan/subkegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan:**
  a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
  b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
  c. Sub Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
  d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
  e. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
  f. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
  g. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
  h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
  i. Penyusunan Standar Harga
  j. Penatausahaan Barang Milik Daerah
  k. Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  l. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
  m. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
  n. Penagihan Pajak Daerah
  o. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
  p. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  q. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  r. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  s. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  t. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  u. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  v. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan:**
  a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
d. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja yang direncanakan

  Berdasarkan laporan evaluasi hingga Triwulan II 2026, tidak ada kegiatan, maupun subkegiatan yang capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan (> 100%). Capaian kinerja tertinggi yang tercatat berada pada angka 100% (Sangat Tinggi).

Adapun faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja diantaranya adalah :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.

   Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS sampai dengan Triwulan II 2026 capaian realisasinya sebesar 0. sub kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan KUA dan PPAS tahun 2027. Sampai dengan triwulan II tahun 2026 kegiatan ini belum terlaksana. Proses akan dimulai pada Juli-Agustus 2026 dan akan tercapai pada Triwulan III tahun 2026

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

   Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sampai dengan Triwulan II 2026 capaian realisasinya sebesar 0. sub kegiatan ini adalah dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2026. Sampai dengan triwulan II tahun 2026 kegiatan ini belum terlaksana. Kegiatan ini dimulai pada bulan Juli-Agustus dan Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Daerah kepada DPRD tahun 2026 dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

c. Sub Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Sub Kegiatan ini sampai dengan triwulan II 2026 capaian realisasinya sebesar 0 dikarenakan proses penyusunan Perda tentang APBD tahun 2027 dimulai pada bulan Juli-September 2026 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat di Minggu kedua Bulan September 2026

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD capaian realisasi kinerja sebesar 0 dikarenakan proses penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD 2026 dimulai pada bulan Juli-Sepember 2026 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat di minggu kedua Bulan September.
e. faktor penyebab belum tercapainya target kinerja secara maksimal untuk beberapa indikator berada pada kategori 'Rendah' adalah karena baru merepresentasikan realisasi s.d. Triwulan II, di mana capaian fisik rata-rata berada di angka 50%. Sisa target kegiatan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan berkelanjutan dan diproyeksikan akan tercapai sepenuhnya pada Triwulan IV. Dengan mempertimbangkan bahwa periode evaluasi masih sampai dengan Triwulan II, capaian sebesar 50% tersebut belum dapat dijadikan sebagai gambaran capaian akhir Tahun 2026. Masih terdapat waktu dan tahapan pelaksanaan pada Triwulan III dan Triwulan IV untuk menyelesaikan target yang belum terealisasi. Oleh karena itu, diharapkan seluruh kegiatan yang masih berproses dapat diselesaikan sesuai rencana sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai pada Triwulan IV Tahun 2026.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah adanya beberapa indikator kinerja yang capaian sementaranya baru mencapai 50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian target tahunan masih dalam proses pemenuhan dan belum seluruhnya terealisasi pada periode evaluasi.

Namun demikian, capaian tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian target program Renstra secara keseluruhan, mengingat beberapa kegiatan masih memiliki tahapan pelaksanaan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026. Capaian sebesar 50% pada saat evaluasi lebih

menggambarkan progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan pertengahan tahun dan bukan merupakan capaian akhir tahun.

Kegiatan yang belum mencapai target secara penuh akan terus dilaksanakan dan dipantau pada periode berikutnya sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. Dengan masih tersedianya waktu pelaksanaan sampai dengan akhir Tahun 2026, target kinerja yang belum tercapai diharapkan dapat dipenuhi pada Triwulan IV. Oleh karena itu, kondisi capaian sampai dengan Triwulan II diproyeksikan tidak menghambat pencapaian target program Renstra pada akhir periode, sepanjang pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan dilakukan pengendalian secara berkelanjutan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 masih sebesar 50%, sehingga tahapan kegiatan yang belum terlaksana dapat segera ditindaklanjuti.
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026 tetap sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, sehingga target kinerja tahunan dapat tercapai.
3. Melakukan percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang masih berproses dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran, serta kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
4. Mengoptimalkan koordinasi antarbidang dan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan dukungan atau keterlibatan lebih dari satu pihak, sehingga hambatan dalam penyelesaian tahapan kegiatan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1
Rencana Perubahan Renja Tahun 2026

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Julah Pagu Awal		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)		Renja	APBD (Perbup II)	
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	16
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN						
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32,378,830,203**	**25,300,669,364**	**29,296,181,375**	**(3,136,290,528)**	**3,995,512,011**	
1	**Administrasi Keuangan perangkat daerah**	**22,380,891,785**	**24,305,812,045**	**25,903,889,243**	**3,522,997,458**	**1,598,077,198**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22,380,891,785	24,305,812,045	25,903,889,243	3,522,997,458	1,598,077,198	Penambahan utang belanja insentif 1.598.077.198
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	menambah subkeg baru ambil dari cetak ganda 1,5jt
3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**76,230,600**	**22,588,900**	**76,230,600**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	76,230,600	22,588,900	76,230,600	LCD (4 UNIT) : 30.355.600 Whiteboard : 1.375.000 Laptop : 22.000.000 Scanner : 15.000.000 Kamera zoom : 7.500.000

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Julah Pagu Awal		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)		Renja	APBD (Perbup II)	
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	16
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**126,000,000**	**104,800,000**	**109,287,000**	**(16,713,000)**	**4,487,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	7,500,000	7,500,000	(2,500,000)	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	20,000,000	25,539,000	(4,461,000)	5,539,000	- Penambahan rincian rekening (papan whiteboard) 125.000 ambil dari pemeliharaan FC - penambahan anggaran 1.577.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,000,000	8,550,000	7,050,000	(1,950,000)	(1,500,000)	ATK digeser untuk subkeg penyusunan dok perencanaan PD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,000,000	23,750,000	24,198,000	(802,000)	448,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52,000,000	45,000,000	45,000,000	(7,000,000)	-	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9,679,122,218**	**709,756,929**	**2,970,864,778**	**(6,708,257,440)**	**2,261,107,849**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215,000,000	200,000,000	189,000,000	(26,000,000)	(11,000,000)	pengurangan anggaran untuk ke beberapa subkegiatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9,464,122,218	509,756,929	2,781,864,778	(6,682,257,440)	2,272,107,849	honor PPPK Pw Se Kab Tmg, Gaji 13 PPPK PW, JKK PPPK PW

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Julah Pagu Awal		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)		Renja	APBD (Perbup II)	
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	16
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**192,816,200**	**180,300,390**	**234,409,754**	**41,593,554**	**54,109,364**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	90,316,200	85,800,390	127,880,154	37,563,954	42,079,764	penambahan untuk operasional BBM dan Pemeliharaan kendaraan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	- pergeseran antar rekekeniing untuk pemeliharaan audio 1,2 jtk ambil dari cctv - pemel komp 4jt ambil dari Lembur - Pemindahan pemeliharaan FC 1,5 jt untuk beli whiteboard
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	9,500,000	14,330,000	4,330,000	4,830,000	pemeliharaan server
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42,500,000	35,000,000	42,199,600	(300,400)	7,199,600	Pemeliharaan PC
B	**PROGRAM PENEGLOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**130,289,104,500**	**253,159,918,011**	**250,317,512,947**	**120,028,408,447**	**(2,842,405,064)**	
1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**261,810,500**	**218,000,000**	**218,000,000**	**(43,810,500)**	**-**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	24,000,000	18,000,000	18,000,000	(6,000,000)	-	Tidak berubah

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Julah Pagu Awal		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)		Renja	APBD (Perbup II)	
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	16
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17,500,000	15,000,000	15,000,000	(2,500,000)	-	Tidak berubah
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	98,310,500	90,000,000	90,000,000	(8,310,500)	-	Tidak berubah
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	122,000,000	95,000,000	95,000,000	(27,000,000)	-	Tidak berubah
2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**225,000,000**	**158,999,564**	**143,999,500**	**(81,000,500)**	**(15,000,064)**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	225,000,000	158,999,564	143,999,500	(81,000,500)	(15,000,064)	Pergesaran JKK JKM Kesehatan untuk belanja modal Mesiin Scanner 15jt
3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**323,500,000**	**220,000,000**	**220,000,000**	**(103,500,000)**	**-**	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	196,500,000	170,000,000	170,000,000	(26,500,000)	-	Tidak berubah
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	127,000,000	50,000,000	50,000,000	(77,000,000)	-	Tidak berubah

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Julah Pagu Awal		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)		Renja	APBD (Perbup II)	
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	16
	Pemerintah Kabupaten/Kota						
4	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuda	129,478,794,000	252,562,918,447	249,735,513,447	120,256,719,447	(2,827,405,000)	
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	114,766,200,000	236,761,006,957	233,579,006,957	118,812,806,957	(3,182,000,000)	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1,000,000,000	724,995,000	724,995,000	(275,005,000)	-	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13,712,594,000	15,076,916,490	15,431,511,490	1,718,917,490	354,595,000	kurang salur belanja bagi hasil tahun 2025
C	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**423,000,000**	**274,250,000**	**274,250,000**	**(148,750,000)**	**-**	
1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**423,000,000**	**274,250,000**	**274,250,000**	**(148,750,000)**	**-**	
	Penyusunan Standar Harga	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	-	Tidak Berubah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	365,000,000	240,000,000	218,000,000	(147,000,000)	(22,000,000)	berkurg geser ke opttimalisasi untuk appraisal bmd
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	47,500,000	23,750,000	45,750,000	(1,750,000)	22,000,000	appraisal BMD

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Julah Pagu Awal		Jumlah Pagu Perubahan Renja	Bertambah/Berkurang (-/+)		Keterangan
		Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)		Renja	APBD (Perbup II)	
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5-4	16
D	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**522,219,244**	**373,109,622**	**380,909,622**	**(141,309,622)**	**7,800,000**	
1	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**522,219,244**	**373,109,622**	**380,909,622**	**(141,309,622)**	**7,800,000**	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	192,219,244	96,109,622	96,109,622	(96,109,622)	-	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	90,400,000	75,000,000	75,000,000	(15,400,000)	-	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	196,600,000	175,000,000	182,800,000	(13,800,000)	7,800,000	penambahan anggaran untuk belanja pita printonix
	Penagihan Pajak Daerah	18,000,000	12,000,000	12,000,000	(6,000,000)	-	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	25,000,000	15,000,000	15,000,000	(10,000,000)	-	
	Total sebelum ditambah penunjang urusan kewenangan keuda/Program dan Kegiatan	34,134,359,947	26,545,028,550	30,533,340,497	(3,654,661,150)	3,988,311,947	
	Total setelah ditambah penunjang urusan kewenangan keuda	163,613,153,947	279,107,946,997	280,268,853,944	116,655,699,997	1,160,906,947	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Dari tabel di atas, berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2026, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Awal Renja : Rp 163.613.153.947
2. Pagu Awal APBD (Perubahan Perbup II) : Rp 279.107.946.997
3. Pagu Perubahan : Rp 280.268.853.944
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp 116.655.699.997
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal APBD : Rp 1.160.906.947

Selisih antara Pagu Awal Renja dengan Pagu Perubahan antara lain disebabkan:

1. penyesuaian anggaran gaji dan tunjangan ASN;
2. Adanya reviu dari inspektorat terkait penambahan subkegiatan baru pada perubahan 2026 agar selaras dengan Renstra tahun 2025-2029;
3. Belanja Modal Whiteboard, Scanner, dan Kamera zoom untuk mendukung tugas sehari-hari;
4. Penyesuaian anggaran disesuiakan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Adanya penambahan anggaran untuk hutang belanj ainsentif tahun 2025;
2. Adanya reviu dari ispektorat terkai penambahan subkegiatan baru pada perubahan 2026 agar selaras dengan Renstra tahun 2025-2029;
3. Belanja Modal LCD, Whiteboard, Laptop, Scanner, dan Kamera zoom untuk mendukung tugas sehari-hari;
4. Penyesuaian pagu anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan Semester I 2026 dan Prognosis Prognosis realisasi Semester II
5. Penambahan anggaran untuk kurang salur Bagi Hasil Pajak dan retribusi Kepada Desa Tahun 2025.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026

Rincian rencana Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3. 2
Perubahan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN**														
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**				**32,378,830,203**	**25,300,669,364**				**29,296,181,375**	**(3,136,290,528)**	**3,995,512,011**		
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan perangkat daerah**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN**		**100**	**%**	**22,380,891,78**	**24,305,812,045**		**100**	**%**	**25,903,889,243**	**3,522,997,458**	**1,598,077,198**		
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tmg	8036	Orang/ bulan	22,380,891,78	24,305,812,045	Kab Tmg	64	Orang/ bulan	25,903,889,243	**3,522,997,458**	1,598,077,198	DAU	Penambahan utang belanja insentif 1.598.077.198 dan geser geser
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab Tmg**	**100**	**%**	**-**	**-**	**Kab Tmg**	**100**	**%**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,500,000**		
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	**7**	**Dokumen**	1,500,000	1,500,000	1,500,000	DAU	menambah subkeg baru ambil dari cetak ganda 1,5jt

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**76,230,600**	**22,588,900**	**76,230,600**	**DAU**	
5	02	**01**	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					**-**		**8**	**unit**	76,230,600	22,588,900	76,230,600	DAU	LCD (4 UNIT) : 30.355.600 Whiteboard : 1.375.000 Laptop : 22.000.000 Scanner : 15.000.000 Kamera zoom : 7.500.000
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya bahan logistik kantor, terlaksananya perjalanan dinas,dan terpenuhinya instalasi listrik bangunan kantor**	**Kab Tmg**	**100**	**%**	**126,000,000**	**104,800,000**	**Kab Tmg**	**100**	**%**	**109,287,000**	**(16,713,000)**	**4,487,000**		
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Tmg	12	Paket	10,000,000	7,500,000	Kab Tmg	12	Paket	7,500,000	(2,500,000)	-	DAU	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Tmg	12	Paket	30,000,000	20,000,000	Kab Tmg	12	Paket	25,539,000	(4,461,000)	5,539,000	DAU	- Penambahan rincian rekening (papan whiteboard) 125.000 ambil dari pemeliharaan FC - penambahan anggaran 1.577.000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tmg	12	Paket	9,000,000	8,550,000	Kab Tmg	12	Paket	7,050,000	(1,950,000)	(1,500,000)	DAU	ATK digeser untuk subkeg penyusunan dok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
																			perencanaan PD
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tmg	12	laporan	25,000,000	23,750,000	Kab Tmg	12	laporan	24,198,000	(802,000)	448,000	DAU	Pergeseran antar subkeg 1.577.000 ke logistik (perabot kantor) dan dapat tambahan dari subkeg lain
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tmg	12	laporan	52,000,000	45,000,000	Kab Tmg	12	laporan	45,000,000	(7,000,000)	-	DAU	
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terbayarnya listrik listrik dan air, terdistribusinya surat serta tersedianya jasa pelayanan umum kantor**	**Kab Tmg**	**100**	**%**	**9,679,122,218**	**709,756,929**	**Kab Tmg**	**100**	**%**	**2,970,864,778**	**(6,708,257,440)**	**2,261,107,849**		
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Tmg	12	laporan	215,000,000	200,000,000	Kab Tmg	12	laporan	189,000,000	(26,000,000)	(11,000,000)	DAU	pengurangan anggaran untuk ke beberapa subkegiatan
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Tmg	12	laporan	9,464,122,218	509,756,929	Kab Tmg	12	laporan	2,781,864,778	(6,682,257,440)	2,272,107,849	DAU	honor PPPK Pw Se Kab Tmg, Gaji 13 PPPK PW, JKK PPPK PW
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terbayarnya pajak kendaraan dinas, terpeliharanya gedung, sarana dan prasarana gedung kantor, serta pendukung gedung kantor**	**Kab Tmg**	**100**	**%**	**192,816,200**	**180,300,390**	**Kab Tmg**	**100**	**%**	**234,409,754**	**41,593,554**	**54,109,364**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Tmg	60	unit	90,316,200	85,800,390	Kab Tmg	51	unit	127,880,154	37,563,954	42,079,764	DAU	penambahan untuk operasional BBM dan Pemeliharaan kendaraan
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tmg	3	unit	50,000,000	50,000,000	Kab Tmg	2	unit	50,000,000	-	-	DAU	- pergeseran antar rekekeniing untuk pemeliharaan audio 1,2 jtk ambil dari cctv - pemel komp 4jt ambil dari Lembur - Pemindahan pemeliharaan FC 1,5 jt untuk beli whiteboard
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tmg	20	unit	10,000,000	9,500,000	Kab Tmg	45	unit	14,330,000	4,330,000	4,830,000	DAU	pemeliharaan server
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tmg	50	unit	42,500,000	35,000,000	Kab Tmg	919	unit	42,199,600	(300,400)	7,199,600	DAU	–pergeseran antar rekekeniing untuk pemeliharaan audio 700rb ambil dari cctv, 500 dari pemel computer –pemel komp 4jt ambil dari Lembur + 4.699.600 –Pemindahan pemeliharaan FC 1,5 jt untuk beli whiteboard

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENEGLOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-Persentase dokumen penganggaran tepat waktu -Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD**	**100 95**	**% %**		**130,289,104,500**	**253,159,918,011**	**100 95**	**% %**		**250,317,512,947**	**120,028,408,447**	**(2,842,405,064)**		
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terlaksananya koodinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Terlaksananya Penyusunan KUA dan PPAS Serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**				**261,810,500**	**218,000,000**				**218,000,000**	**(43,810,500)**	**-**		
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab Tmg	2	Dokumen	24,000,000	18,000,000	Kab Tmg	2	Dokumen	18,000,000	(6,000,000)	-	DAU	TIDAK BERUBAH
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab Tmg	2	Dokumen	17,500,000	15,000,000	Kab Tmg	2	Dokumen	15,000,000	(2,500,000)	-	DAU	TIDAK BERUBAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Tmg	2	Dokumen	98,310,500	90,000,000	Kab Tmg	2	Dokumen	90,000,000	(8,310,500)	-	DAU	nambah di honor TAPD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Tmg	2	Dokumen	122,000,000	95,000,000	Kab Tmg	2	Dokumen	95,000,000	(27,000,000)	-	DAU	nambah di honor TAPD
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terlaksananya pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Temanggung**		**100**	**%**	**225,000,000**	**158,999,564**		**100**	**%**	**143,999,500**	**(81,000,500)**	**(15,000,064)**		
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Tmg	4000	Dokumen	225,000,000	158,999,564	Kab Tmg	12	Dokumen	143,999,500	(81,000,500)	(15,000,064)	DAU	Pergesaran JKK JKM Kesehatan untuk belanja modal Mesiin Scanner 15jt
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta terlaksananya Pembinaan Akuntansi semua SKPD**		**100**	**%**	**323,500,000**	**220,000,000**		**100**	**%**	**220,000,000**	**(103,500,000)**	**-**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Tmg	2	Dokumen	196,500,000	170,000,000	Kab Tmg	2	Dokumen	170,000,000	(26,500,000)	-	DAU	Pergeseran rekening Belanja :emburke rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp6.475.000,00
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Tmg	1236	orang	127,000,000	50,000,000	Kab Tmg	1236	orang	50,000,000	(77,000,000)	-	DAU	Tidak berubah
					Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuda	Tersalurkannya dana bantuan keuangan dan dana bagi hasil		100	%	129,478,794,000	252,562,918,447		100	%	249,735,513,44	120,256,719,447	(2,827,405,000)		
5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Tmg	12	laporan	114,766,200,000	236,761,006,957	Kab Tmg	12	laporan	233,579,006,95	118,812,806,95	(3,182,000,000)	DAU	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Tmg	12	laporan	1,000,000,000	724,995,000	Kab Tmg	1	laporan	724,995,000	(275,005,000)	-	DAU	
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Tmg	12	laporan	13,712,594,000	15,076,916,490	Kab Tmg	12	laporan	15,431,511,490	1,718,917,490	354,595,000	DAU	kurang salur belanja bagi hasil tahun 2025 -> 354.595.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**- Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu - Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja**		**100 80**	**% %**	**423,000,000**	**274,250,000**		**100 80**	**% %**	**274,250,000**	**(148,750,000)**	**-**		
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pensertifikatan barang milik daerah, Tersusunnya standar harga**		**100 %**		**423,000,000**	**274,250,000**		**100 %**		**274,250,000**	**(148,750,000)**	**-**		
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab Tmg	6	Dokumen	10,500,000	10,500,000	Kab Tmg	2	Dokumen	10,500,000	-	-	DAU	Tidak Berubah
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	1236	Dokumen	365,000,000	240,000,000	Kab Tmg	1236	Dokumen	218,000,000	(147,000,000)	(22,000,000)	DAU	berkurg geser ke opttimalisasi untuk appraisal bmd
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Tmg	600	Dokumen	47,500,000	23,750,000	Kab Tmg	412	Dokumen	45,750,000	(1,750,000)	22,000,000	DAU	appraisal BMD
5	**02**	**04**			**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah**				**522,219,244**	**373,109,622**				**380,909,622**	**(141,309,622)**	**7,800,000**		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**-Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah -Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu - Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu**		**8 95 100 100**	**% % % %**	**522,219,244**	**373,109,622**		**8 95 100 100**	**% % % %**	**380,909,622**	**(141,309,622)**	**7,800,000**		
5	2	4	2.01	00 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Tmg	4	Laporan	192,219,244	96,109,622	Kab Tmg	2	laporan	96,109,622	(96,109,622)	-		Pergeseran rekening satu subkeg
5	02	04	2.01	00 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak , Subjek Pajak,dan Wajib Pajak Daerah	Kab Tmg	12	Laporan	90,400,000	75,000,000	Kab Tmg	2	Laporan	75,000,000	(15,400,000)	-		Ada Pergeseran antar subkegiatan Geser Rp2.220.000 dari Belanja Lembur ke Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5	02	04	2.01	00 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Tmg	12	Laporan	196,600,000	175,000,000	Kab Tmg	2	Laporan	182,800,000	(13,800,000)	7,800,000		Rekening lembur berkurang RP1,470,000, dipindah ke Rekening ATK (SPPT Double) Rp1,470,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan (KUA PPAS)				Bertambah/Berkurang (-/+)		Sumber Dana	Keterangan
							Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD (Perbup II)	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12	13=12-7	14=12-8	15	16
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab Tmg	12	Dokumen	18,000,000	12,000,000	Kab Tmg	4	Dokumen	12,000,000	(6,000,000)	-		penambahan untuk insentif desa mengambil dari gaji dan tunjangan
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Tmg	12	Dokumen	25,000,000	15,000,000	Kab Tmg	2	Dokumen	15,000,000	(10,000,000)	-		Ada Pergeseran dalam subkegiatan
					Total sebelum ditambah penunjang urusan kewenangan keuda/ Program dan Kegiatan					34,134,359,947	26,545,028,550				30,533,340,497	(3,654,661,150)	3,988,311,947		
					Total setelah ditambah penunjang urusan kewenangan keuda					163,613,153,947	279,107,946,997				280,268,853,944	116,655,699,997	1,160,906,947		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 yang telah disusun sesuai dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun untuk meningkatkan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2026, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2026, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah terdiri dari 4 program 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp 280.268.853.944,00. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah pada Perubahan Renja Tahun 2026 juga senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2026 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Tahun 2026 ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 28 Agustus 2026

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

N. Bagus Pinuntun, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007191990091001